

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS DESA DI KABUPATEN MUARA ENIM: SOLUSI EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Imam Radiano Anwar Setia Putra¹, Suci Emilia Fitri², Melati Ayuning Pranasari³, Azmi Listya Anisah⁴, Yulia Fitriani⁵

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Gatot Subroto No.10, RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

Corresponding author: Suci Emilia Fitri

Corresponding e-mail: suci018@brin.go.id

Corresponding phone number: 085274654499

Abstract

Berbagai masalah yang dihadapi oleh Muara Enim seperti infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya pemahaman pengelolaan pariwisata, dan keterbatasan promosi wisata menjadi penyebab keindahan alam dan potensi desa tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Belum adanya penelitian yang menggali karakteristik lokal dan potensi pengembangan pariwisata di Muara Enim menjadi satu celah kekosongan literatur yang perlu diisi. Untuk itu, artikel ini akan menganalisis pengembangan pariwisata berbasis desa di Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan teori pariwisata berkelanjutan dan menjabarkannya dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Pendekatan studi kasus dengan metode in-depth interview digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari studi ini menekankan bahwa potensi yang dimiliki Muara Enim dapat menjadi potensi besar untuk meningkatkan perekonomian lokal, namun memerlukan pendekatan yang tepat. Penerapan lima modal dan tiga dimensi utama diperlukan Muara Enim dalam membangun pariwisata berkelanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

Keywords: pariwisata berkelanjutan, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi lingkungan, Muara Enim

I. PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Keanekaragaman budaya, alam, dan tradisi yang dimiliki Indonesia menjadi potensi luar biasa untuk mengembangkan pariwisata berbasis desa. Kehidupan pedesaan yang tenang, keindahan alam, dan mengenal lebih dekat budaya lokal setempat, menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan dan menjadikan desa wisata semakin populer di kalangan wisatawan.

Melalui pengembangan desa wisata, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pariwisata, tetapi juga mampu mempertahankan budaya lokal, kearifan tradisional, serta kelestarian lingkungan. Beberapa studi menunjukkan bahwa desa wisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan kerja di daerah tertinggal ([Putra et al., 2020](#)), ([Suryani et al., 2020](#)). Dengan mengintegrasikan pariwisata dan pengelolaan potensi lokal, desa wisata berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Seiring dengan perkembangannya, desa wisata semakin diakui sebagai motor penggerak perekonomian lokal dengan terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan asli daerah, membantu pemberdayaan masyarakat desa, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya ([Ariesta & Widiantara, 2020](#)).

Desa Nglangeran atau lebih dikenal sebagai Gunung Api Purba Nglangeran yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, adalah salah satu contoh desa yang sukses membangun desa wisata dengan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya lokal. Masyarakat Desa Nglangeran membangun homestay, restoran, dan pusat oleh-oleh melalui pengelolaan yang baik. Hal ini kemudian mampu kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan diversifikasi ekonomi ([Mahrofi, 2024](#)). Selain Desa Ngalangeran, Desa Papayan di Tasikmalaya, tidak hanya berhasil beradaptasi dengan perkembangan industri pariwisata, tetapi juga mampu mengubah dirinya menjadi destinasi wisata yang sukses. Masyarakat desa berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan berbagai pihak terkait untuk membangun infrastruktur pariwisata, seperti pengembangan jalan, perbaikan fasilitas publik, dan pendirian homestay untuk para wisatawan. Selain itu, mereka juga mengadakan pelatihan dan workshop bagi

masyarakat desa agar mereka dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi para wisatawan. (Pemerintah Desa Papayan, 2023)

Meskipun telah banyak desa wisata berkembang dengan baik, namun tidak semua desa wisata mampu menghadapi tantangan, mengelola, memaksimalkan potensi yang dimiliki, dan meminimalisir dampak negatif. Suatu desa wisata dapat dikatakan menjadi desa wisata berkelanjutan jika mampu menerapkan konsep pembangunan yang stabil dengan menangkap kebutuhan generasi saat ini tanpa menguras kapasitas generasi mendatang, dengan cara yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat (World Commission on Environment and Development (WCED), 1987). Pengelolaan desa wisata berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengeksplorasi dan memberdayakan potensi desa dengan focus mengimplementasikan standar-standar berkelanjutan yang meliputi standar sosial, lingkungan dan ekonomi (Nadra, 2021).

Pengembangan desa wisata yang berkelanjutan memang menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian nilai sosial budaya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengelola pariwisata tanpa merusak lingkungan. Meskipun potensi ekonomi dari desa wisata sangat besar, pengelolaan yang tidak hati-hati dapat menyebabkan kerusakan alam dan sumber daya yang ada. Seperti yang terjadi di Desa Jelok, pengelolaan aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan masih menjadi tantangan besar meskipun desa tersebut memiliki ekowisata yang layak diperhitungkan (Adinda, 2016). Selain itu, peningkatan kesadaran sosial dan budaya juga menjadi faktor krusial dalam pengembangan desa wisata. Peran masyarakat lokal sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pariwisata dan pelestarian budaya serta sosial mereka (Amil, Maniza, & Wahyudi, 2019).

Tantangan dalam mengembangkan pariwisata berbasis desa juga dialami Muara Enim, sebuah kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki keindahan alam dan potensi budaya yang belum sepenuhnya digali. Muara Enim masih menghadapi masalah infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan pariwisata, dan keterbatasan dalam promosi pariwisata yang mengarah pada ketidakefektifan dalam menarik wisatawan (Ariesta & Widiantara, 2020). Masalah tersebut berdampak pada pengembangan ekonomi lokal yang terbatas. Potensi desa untuk meningkatkan pendapatan melalui pariwisata tidak dimanfaatkan sepenuhnya, yang berujung pada rendahnya kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, kurangnya pengelolaan yang baik mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kehilangan nilai-nilai budaya yang seharusnya menjadi daya tarik utama desa wisata. Masyarakat setempat yang tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan pariwisata juga tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang maksimal dari potensi wisata yang ada (Andriani, Wibowo, & Winarno, 2020).

Ketidaksesuaian dalam pengelolaan desa wisata berkelanjutan berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan. Peningkatan jumlah wisatawan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, erosi budaya, dan ketimpangan sosial. Dampak sosial ini mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan pariwisata. Dampak ekonomi yang tidak merata, serta kerusakan lingkungan yang tidak terkelola dengan baik, hanya memperburuk ketergantungan pada sektor pariwisata yang rapuh dan rentan terhadap perubahan pasar global. Meskipun telah banyak penelitian mengenai pengembangan desa wisata secara umum, penelitian yang secara khusus membahas pengembangan pariwisata berbasis desa di Muara Enim masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada daerah-daerah dengan pengembangan pariwisata yang sudah lebih maju, seperti Bali atau Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian yang membahas karakteristik lokal, tantangan spesifik, serta potensi pengembangan pariwisata di Muara Enim sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan pengetahuan dalam literatur ini (Kariana, Treman, & Suditha, 2014).

Artikel ini akan menganalisis pengembangan pariwisata berbasis desa di Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan teori pariwisata berkelanjutan dan menjabarkan dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan serta melihat juga peran serta Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisatanya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Grand theory biasanya mencakup konsep-konsep yang lebih luas dan universal dalam memahami fenomena sosial atau ekonomi. Dalam konteks pariwisata berbasis desa, teori yang dapat digunakan adalah Teori Pembangunan Berkelanjutan dan Teori Pembangunan Ekonomi Lokal. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep yang menekankan pada pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam kerangka ini, keberlanjutan tidak hanya dilihat dari sisi pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga memperhatikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konteks pariwisata berbasis desa, pembangunan berkelanjutan menjadi suatu pendekatan yang sangat relevan. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan aspek ekonomi lokal dengan pelestarian budaya dan lingkungan hidup. Pariwisata desa, jika dikelola dengan baik, memiliki potensi untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan tanpa mengorbankan kelestarian alam dan budaya yang ada (Brundtland, 1987).

Pariwisata berbasis desa berfokus pada pengembangan potensi lokal yang ada, seperti keindahan alam, kearifan lokal, dan warisan budaya, untuk menarik wisatawan. Pembangunan sektor pariwisata ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan peluang untuk pelestarian budaya dan tradisi setempat. Misalnya, pengembangan homestay dan wisata budaya dapat membantu masyarakat untuk menjaga warisan budaya mereka, sambil memperkenalkan tradisi tersebut kepada wisatawan. Selain itu, pengelolaan pariwisata berbasis desa yang berkelanjutan juga memperhatikan aspek lingkungan, seperti pengelolaan sampah, pelestarian ekosistem, dan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana. Pendekatan ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang sering terjadi dalam pariwisata massal, serta mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga alam.

Pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam pariwisata desa juga didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pariwisata berbasis desa dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Menurut (Timur & Getz, 2008), pariwisata berbasis komunitas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dengan menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Selain itu, pariwisata desa yang berkelanjutan juga dapat berperan dalam konservasi alam dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya alam mereka. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata berbasis desa yang mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dapat menjadi model yang efektif dalam mencapai keseimbangan antara manfaat ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan.

Teori pemberdayaan ekonomi lokal menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan potensi ekonomi di tingkat desa untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Porter, 1990). Dalam konteks pariwisata berbasis desa, pemberdayaan ini dapat terjadi melalui pengembangan potensi lokal, seperti keindahan alam, budaya, dan kerajinan tangan. Pemberdayaan ekonomi melalui pariwisata berbasis desa tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa tetapi juga memperkuat keberagaman ekonomi dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Dengan pengelolaan yang tepat, pariwisata berbasis desa dapat menjadi motor penggerak yang mendorong kemajuan ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang seperti Kabupaten Muara Enim.

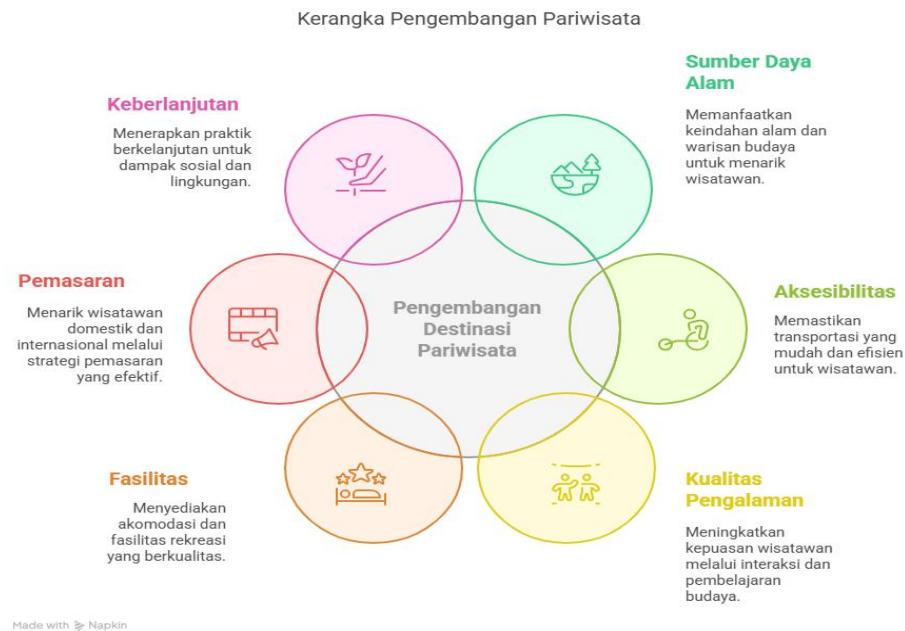
Pengembangan pariwisata berbasis desa juga mendorong keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal. Dengan melibatkan masyarakat

dalam pengelolaan pariwisata, ada potensi untuk menjaga kelestarian alam dan warisan budaya. Sebagai contoh, di Kabupaten Muara Enim, pengembangan pariwisata berbasis desa dapat memanfaatkan potensi alam dan budaya lokal untuk menarik wisatawan, sambil menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Hal ini dapat memperkuat identitas budaya lokal sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Menurut (Pine & Gilmore, 1999), sektor ekonomi kreatif yang digerakkan oleh pariwisata berbasis desa dapat menciptakan pengalaman yang autentik, yang pada gilirannya memberikan dampak positif bagi perekonomian desa

Middle theory berfokus pada konsep yang lebih spesifik dan aplikatif. Dalam hal ini, Teori Pariwisata Berkelanjutan dan Teori Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Pariwisata adalah teori-teori yang lebih mengarah pada implementasi praktis dalam konteks desa. Teori ini menyarankan bahwa pariwisata harus dijalankan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, yaitu melibatkan masyarakat lokal, pelestarian lingkungan, dan penyediaan manfaat ekonomi yang adil. Pengembangan pariwisata berbasis desa di Kabupaten Muara Enim bisa menciptakan keseimbangan antara menarik wisatawan dan melestarikan sumber daya alam serta budaya lokal (McCool & Moisey, 2008). Selain itu teori pemanfaatan sumber daya alam membahas bagaimana sumber daya alam, seperti keindahan alam, budaya, dan keunikan desa, dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menarik wisatawan. Namun, pemanfaatannya harus dengan hati-hati agar tidak menyebabkan kerusakan atau kehilangan nilai keaslian (McCool & Moisey, 2008).

Applied theory berfokus pada penerapan langsung dalam praktik. Untuk Kabupaten Muara Enim, teori yang bisa diterapkan adalah Teori Pemberdayaan Masyarakat dan Teori Pengembangan Destinasi Pariwisata. Pemberdayaan masyarakat desa adalah inti dari pengembangan pariwisata berbasis desa. Teori ini mengajarkan bagaimana masyarakat desa dapat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pariwisata agar mereka mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial. Ini termasuk pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan, pemberian akses pasar, dan penyuluhan tentang keberlanjutan (Chambers, 1997).

Teori Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dikemukakan oleh (Ritchie & Crouch, 2003) dalam buku *The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective* memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana sebuah destinasi pariwisata dapat dikembangkan agar mampu bersaing di pasar global dan lokal, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Ritchie dan Crouch mengemukakan bahwa pengembangan destinasi pariwisata yang kompetitif memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pemasaran destinasi. Konsep ini mengedepankan penciptaan daya tarik yang kuat bagi wisatawan sambil mempertimbangkan keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan. Menurut mereka, untuk menciptakan destinasi yang kompetitif, beberapa faktor utama perlu diperhatikan, seperti kualitas pengalaman wisatawan, keterlibatan komunitas lokal, serta pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang bijaksana. Kerangka pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 2.1 :Kerangka Pengembangan Pariwisata Berkelaanjutan Sumber: (Ritchie & Crouch, 2003)

III. METODE PENELITIAN

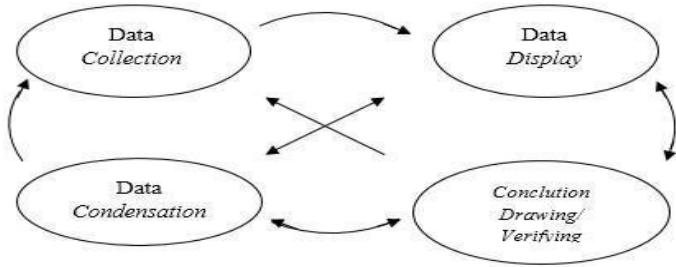
Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini dan berfokus pada Pariwisata berbasis desa dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian merupakan penelitian deskriptif, bertujuan memberikan gambaran lebih mendetail berdasarkan keadaan sebenarnya yang dihimpun dari data primer dan sekunder di lokus penelitian. Penelitian pada lokus dilakukan dengan wawancara sebagai data primer terhadap informan pada lokus penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan, Analisis, Teknik Pengumpulan Data dan Informan

No	Tujuan	Analisis	Teknik Pengumpulan Data	Informan
	Menganalisis Pariwisata berbasis Desa dari sisi ekonomi dan sosial	1. Literatur review 2. Model Analisa Data Interaktif	In-depth Interview, Observasi	1. Pemerintah Daerah (Balitbangda, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) 2. Kepala Desa Wisata 3. Pokdarwis Desa Wisata 4. Masyarakat Desa Wisata

Sumber: data diolah

Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari pendokumentasian dan kepustakaan. Analisa terhadap dokumen dan aplikasi aplikasi yang sudah terbentuk dalam dalam memetakan potensi ekonomi dan perkembangannya akan analisis dalam gambar berikut:



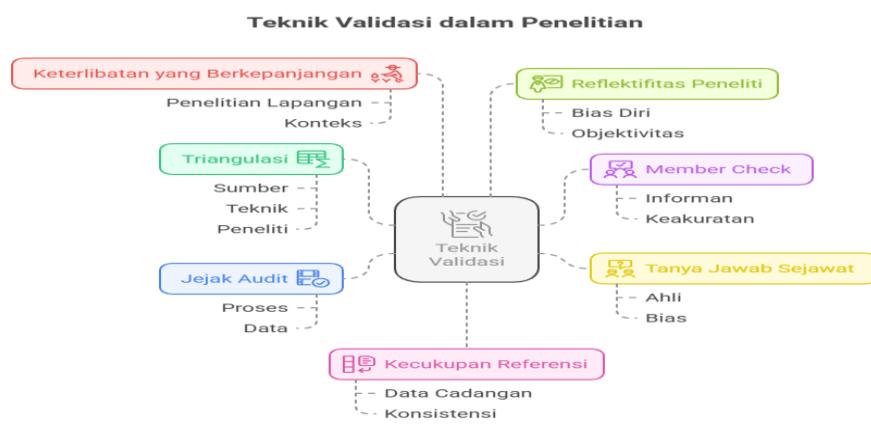
Gambar 3.1 Model Analisa Data Interaktif(Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Untuk memetakan permasalahan dan potensi meliputi langkah-langkah:

- Reduksi Data. Reduksi data. Dari lokasi penelitian, data lapangan disajikan secara lengkap dan rinci dalam laporan laporan. Data dan bukti tersebut kemudian direduksi, dirangkum dan kemudian disortir menurut poin-poin utama, dengan fokus pada pemilihan poin-poin yang paling penting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses editing, coding dan tabulasi).
- Penyajian data (visualisasi data) dirancang untuk memudahkan peneliti melihat gambaran besar atau potongan-potongan tertentu dari data penelitian. Pengorganisasian data ini dalam bentuk tertentu (tabel, gambar atau grafik) menjelaskan bahwa angka ini lebih lengkap.
- Penarikan kesimpulan, dalam penelitian kualitatif, pengecekan data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Sejak memasuki lapangan dan dalam proses pengumpulan data, peneliti telah mencoba menganalisis data yang terkumpul untuk memaknainya, yaitu mencari pola tema, kesamaan, dan hipotesis, kemudian menyajikannya dalam bentuk kesimpulan yang masih tentatif adalah Secara bertahap ditarik kesimpulan.

Untuk teknik validasi data dilakukan secara bertahap dimulai dari refleksitas peneliti, member check, tanya jawab sejawat, kecukupan referensi, jejak audit serta triangulasi dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 31.
Teknik Validasi dalam Penelitian



Sumber; data diolah

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan dan pengelolaan pariwisata seharusnya sejalan dengan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan dapat tercapai dengan mempertimbangkan lima jenis modal utama yaitu modal produksi, modal sosial, modal alam, modal manusia dan modal keuangan. **Modal produksi** mengacu pada sarana dan prasarana yang digunakan dalam sektor pariwisata, seperti akomodasi, transportasi, dan fasilitas umum lainnya. **Modal sosial** merujuk pada jaringan sosial dan hubungan antar individu atau kelompok yang mendukung aktivitas pariwisata, seperti kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pengusaha. **Modal alam** melibatkan keanekaragaman hayati, sumber daya alam, dan keindahan alam yang menjadi daya tarik wisata, yang harus dikelola dengan bijaksana agar tetap terjaga. **Modal manusia** mencakup keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat, terutama dalam hal keterampilan perhotelan, pemanduan wisata, dan pengelolaan sumber daya alam. Terakhir, **Modal keuangan** merujuk pada sumber daya finansial yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur serta keberlanjutan operasi pariwisata.

Jika melihat kondisi nyata di Muara Enim, beberapa modal masih menjadi tantangan utama untuk mengembangkan pariwisata keberlanjutannya. Dari segi modal alam, Muara Enim memiliki modal keindahan alam yang luar biasa namun belum dikelola dan dikembangkan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Pariwisata diketahui bahwa pengembangan destinasi wisata belum dilakukan secara maksimal, meskipun modal alam berupa yang dapat menjadi daya tarik wisata telah dimiliki. Hal ini berkaitan juga dengan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas pemerintah terkait.

“Sebenarnya dinas pariwisata ini PRnya sangat banyak pak, antara lain pertama kali kita ini kan dari bidang destinasi soalnya kalau bidang destinasi utamanya kita ini kan dapurnya kan pak yah, kalau misalkan destinasi udah tergali otomatis SDMnya bisa masuk ikrabnya bisa masuk, pemasarannya bisa masuk, tetapi kalau destinasi belum ada mereka itu mau kerja apa gitu kan. Nah itu kan salah satunya kan, nah kami ini di bidang destinasi di bidang pariwisata ini sebenarnya kurang bu, SDMnya di bidang destinasi jabfungnya tiga di bawah saya enggak ada orangnya kosong, terus staff PNS cuman ada satu jadi saya ini serabutan” (Staf Dinas Pariwisata Muara Enim, 2024)

Jumlah sumberdaya manusia yang terlibat turut menentukan ketercapaian modal sosial dalam pengembangan pariwisata keberlanjutan. Pariwisata daerah di Indonesia seringkali dikelola oleh pemerintah daerah bersama dengan perusahaan swasta dan komunitas lokal. Semua pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah dan masyarakat, harus mampu berkolaborasi dan bersinergi dengan baik.

Mengelola pariwisata daerah secara efektif membutuhkan pendekatan multifaset yang dapat memenuhi beragam kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingan. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu destinasi wisata sangat diperlukan dalam pengelolaan pariwisata daerah. Sebuah studi tentang peran pariwisata di negara berkembang mencatat bahwa meskipun pariwisata dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, masyarakat lokal sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan kekecewaan terhadap pariwisata (Wibowo & Belia, 2023). Sedangkan, partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat lokal perlu diprioritaskan sebab masyarakat lokal seringkali menjadi penjaga warisan budaya dan sumber daya alam yang menarik pengunjung (Snyman, McCool, & Bosak, 2016). Dengan memberdayakan pemangku kepentingan lokal dan memastikan

pemerataan manfaat, pariwisata dapat menjadi pendorong kemajuan sosial-ekonomi sambil menjaga integritas aset budaya dan lingkungan.

Perencanaan, pengembangan, dan promosi destinasi wisata adalah beberapa aspek kompleks dari proses pengelolaan pariwisata daerah. Selain mengutamakan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial, pengelolaan pariwisata juga harus didasarkan pada kearifan lokal, budaya, dan karakteristik lingkungan lokal (Rudy & Mayasari, 2019).

Cox (1985, dalam Pitana (2009) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: (1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan; (2) Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata; (3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal; (4) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal; (5) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan oleh Pemerintah Muara Enim dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Muara Enim. Dukungan dan legitimasi terhadap pengembangan pariwisata diberikan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan skala prioritas seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan berikut ini:

“Dari pemerintah ini bukan enggak mau, kan banyak yang lebih skala prioritas dari pada ini dan udah lagi seperti itu kalau misalkan kelembagaannya belum terbentuk, legalitas lahannya belum ada kan, perizinannya belum ada perizinannya, begitu kami memberikan begini, mau kita seperti ini kata saya enggak bisa saya serta merta seperti itu, nanti juga kami memberikan bantuan akhirnya mangkrak. Itu kan namanya enggak tepat sasaran kan, kata saya.”

Pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dan daerah tersebut sambil melindungi dan meningkatkan peluang untuk masa depan dengan harapan kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat terpenuhi dengan tetap mempertahankan integritas budaya, keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan (United Nations and World Tourism Organization, 2025). Rahayu & Saragih (2022) menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan memiliki prinsip umum: 1) menyeimbangkan pemanfaatan lingkungan dengan manfaat ekonomis dari kepariwisataan; 2) menyeimbangkan pemanfaatan sumberdaya lingkungan dengan perubahan nilai social dan masyarakat lokal yang disebabkan oleh penggunaan sumberdaya lingkungan; dan 3) menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan dampak pertumbuhan ekonomi pada nilai social dan masyarakat lokal. Sehingga, selain memerlukan lima modal utama, prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata yang telah dipegang oleh Kabupaten Muara Enim dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan juga memerlukan penerapan tiga dimensi yang meliputi (1) Dimensi Ekonomi; (2) Dimensi Sosial; (3) Dimensi Lingkungan. Ketiga dimensi ini saling berinteraksi dan harus dijaga keseimbangannya agar pariwisata dapat terus berkembang tanpa merusak aspek lainnya. Berbagai permasalahan terkait ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pariwisata berkelanjutan dapat ditangani dengan memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat lokal, prioritas pembangunan berkelanjutan

destinasi wisata, hingga memperhatikan kebutuhan masyarakat akan layanan dan produk pariwisata (Streimikiene, Sragzdiene, & Jasinskas, 2020).



Gambar 2. Membangun Pariwisata Berkelanjutan (Sumber: Data diolah, 2024)

Dimensi Ekonomi dalam pariwisata berkelanjutan berfokus pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal melalui sektor pariwisata. Tujuan utama dari dimensi ini adalah untuk menciptakan memberikan manfaat ekonomi yang adil dan merata kepada semua pihak yang terlibat. Ini termasuk pemberdayaan ekonomi lokal melalui usaha kecil dan menengah (UKM) dengan mempromosikan akses ke pendanaan, pengembangan kapasitas dan peluang pasar untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing UKM (United Nations and World Tourism Organization, 2025). Salah satu strategi yang penting adalah mengembangkan sektor pariwisata yang tidak bergantung hanya pada mass tourism, tetapi juga pada pariwisata berbasis komunitas yang lebih menghargai keberagaman dan keunikan lokal (Gössling, Hall, & Weaver, 2009). Diperlukan kebijakan yang mendukung investasi dalam infrastruktur yang memadai untuk mendorong pembangunan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas hidup dan mendorong keberlanjutan (United Nations and World Tourism Organization, 2025).

Dimensi Sosial dalam pariwisata berkelanjutan berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk lebih produktif dan memastikan bahwa budaya lokal dilestarikan dengan menumbuhkan rasa bangga serta kepemilikan terhadap budaya dan nilai-nilai lokal (United Nations and World Tourism Organization, 2025). Ini termasuk menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pariwisata, serta menjaga keharmonisan sosial antara wisatawan dan penduduk lokal. Pengelolaan yang inklusif dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan rasa memiliki terhadap pariwisata sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Keberhasilan dimensi sosial ini bergantung pada kemampuan komunitas untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang dibawa oleh pariwisata dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Sharpley, 2009). Keberhasilan dimensi ini juga memerlukan kebijakan pemerintah yang dapat mendorong kemitraan antara lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan pelatihan komprehensif yang menjawab kebutuhan keterampilan saat ini dan masa depan.

Dimensi Lingkungan adalah inti dari pariwisata berkelanjutan, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, konservasi keanekaragaman hayati, serta pengurangan jejak karbon. Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, prinsip prinsip green tourism dan ecotourism sangat penting untuk menghindari

kerusakan lingkungan yang dapat disebabkan oleh pembangunan pariwisata yang tidak terkendali. Salah satu langkah penting adalah implementasi teknologi ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah yang baik dan penggunaan energi terbarukan (Butler, 1999).

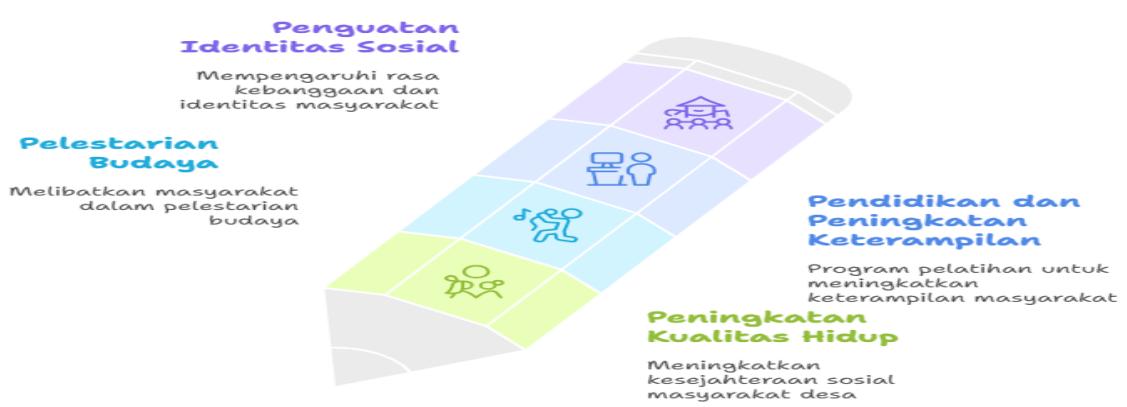
Dengan memadukan lima modal dan ketiga dimensi, pariwisata berkelanjutan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Implementasi yang baik akan memastikan bahwa pariwisata tidak hanya menjadi sumber keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang dapat terus berkembang seiring waktu tanpa merusak lingkungan dan nilai-nilai sosial yang ada (Swarbrooke, 1999).

Dampak Ekonomi Pariwisata Berbasis Desa



Gambar 3 Dampak Ekonomi Pariwisata Berbasis Desa (Sumber : Data diolah 2024)

Dampak Pariwisata Berbasis Desa



Gambar 4. Dampak Sosial Pariwisata Berbasis Desa (Sumber : Data diolah 2024)

V. KESIMPULAN

Pariwisata berbasis desa di Kabupaten Muara Enim memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian lokal dan melestarikan budaya, namun membutuhkan pengelolaan yang bijaksana dan kerjasama antara berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Kabupaten Muara Enim memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan pariwisata berbasis desa, terutama dengan kekayaan alam dan budaya yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pariwisata berbasis desa menawarkan peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperkenalkan budaya lokal kepada dunia. Namun, pengembangan sektor ini membutuhkan pendekatan yang tepat untuk mengatasi tantangan infrastruktur dan keterbatasan promosi yang ada.

Walaupun pariwisata desa dapat membawa manfaat ekonomi, pengelolaannya tidaklah mudah. Kabupaten Muara Enim menghadapi beberapa tantangan signifikan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan pariwisata, terbatasnya infrastruktur, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Ini berpotensi menghambat maksimalisasi manfaat ekonomi dari sektor pariwisata bagi masyarakat desa. Untuk mencapai keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata berbasis desa, keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus dijaga dengan baik. Dimensi ekonomi berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, dimensi sosial berkaitan dengan pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat, sementara dimensi lingkungan berfokus pada konservasi sumber daya alam. Mengelola ketiga dimensi ini dengan hati-hati sangat penting agar pariwisata tidak merusak alam dan budaya setempat.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata adalah kunci utama dalam menciptakan pariwisata berbasis desa yang berkelanjutan. Masyarakat harus diberdayakan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas agar mereka dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan, melestarikan budaya, dan mengelola sektor pariwisata. Tanpa partisipasi yang kuat dari masyarakat, pengembangan pariwisata desa akan sulit mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan dan menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan pariwisata berbasis desa. Dukungan pemerintah dalam hal kebijakan, pembangunan infrastruktur, serta pemberian pelatihan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga sangat penting dalam memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Muara Enim.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, S. (2016). *Pengembangan Desa Wisata Ekologi di Dusun Jelok, Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta* (Skripsi). UPN Veteran, Yogyakarta.
- Amil, A., Maniza, L., & Wahyudi, R. (2019). Peran Pemerintah Desa Poto Tano Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pulau Kenawa Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*.
- Andriani, R. A., Wibowo, A., & Winarno, J. (2020). Analisis Kebutuhan Masyarakat dalam Pengembangan Dewi Sambi (Desa Wisata Samiran Boyolali) di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 12(2), 82–88.

- Ariesta, I., & Widiantara, I. B. G. (2020). Identifikasi Aspek Hukum dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus di Kabupaten Badung Bali). *Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia*, 4(1), 27–32.
- Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development*. Oxford: Oxford University Press.
- Butler, R. W. (1999). Sustainable Tourism: A State-of-the-Art Review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7–25.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Gössling, S., Hall, C. M., & Weaver, D. (2009). *Sustainable Tourism Futures: Perspectives on Systems, Restructuring and Innovations* (First). New York: Routledge.
- Kariana, P., Treman, S., & Suditha, I. (2014). *Perkembangan Akomodasi Goa Gala-Gala Sebagai Objek Wisata Budaya Di Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (Kajian Geografi Pariwisata)*.
- Mahrofi, Z. (2024). Menguatkan Desa Wisata Sebagai Pilar Ekonomi Pedesaan. Retrieved 19 May 2025, from [#google_vignette](https://www.antaranews.com/berita/4458409/menguatkan-desa-wisata-sebagai-pilar-ekonomi-pedesaan)
- McCool, S. F., & Moisey, R. N. (2008). *Tourism, Recreation, and Sustainability: Linking Culture and the Environment* (Second Edition). Oxford: CAB International.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edition). SAGE Publication, Inc.
- Nadra, A. K. (2021). Tinjauan Pengembangan Desa Wisata Rantih Kota Sawahlunto dengan Pendekatan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata Bunda*, 2(1), 13–20.
- Olli, D. (2013). The challenges for the European tourism sustainable. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 4(9), 464–468. <https://doi.org/10.5901/mjss.2013.v4n9p464>
- Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). *The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage*. Boston: Harvard Business Press.
- Pitana, I. G. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.
- Putra, A. K., et al. (2020). *Analisis Strategi Pengembangan Desa Wisata*. <https://consensus.app/papers/analisis-strategi-pengembangan-desa-wisata-putra/72d216b6f48e56b2ae7584aa4eb4d660>
- Rahayu, S., & Saragih, M. G. (2022). *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*. Medan: CV. Tungga Esti.
- Ritchie, J. R. B., & Crouch, G. I. (2003). *The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective*. London: CAB International.
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2019). Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. *Kertha Wicaksana*, 13(2), 73–84.

- Sharpley, R. (2009). *Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?* . New York: Earthscan.
- Snyman, S. ,McCool, S., Bosak, K. (eds). (2016). Strategic Community Participation in Sustainable Tourism. In: *Reframing Sustainable Tourism. Environmental Challenges and Solutions*, Springer, Dordrecht., Vol 2.
- Suryani, N. L. P., et al. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata*. <https://consensus.app/papers/pemberdayaan-masyarakat-pengembangan-desa-wisata-suryani/299db0c9c4ef50e8a1cb53b3f4b5c38b>
- Streimikiene, D., Svagzdiene, B., & Jasinskas, E. (2020). Sustainable Tourism Development and Competitiveness: The Systematic Literature Review. *Sustainable Development*, 29, 259–271.
- Swarbrooke, J. (1999). *Sustainable Tourism Management*. New York: CABI Pub.
- Timur, S., & Getz, D. (2008). Sustainable Tourism and Community Development in The Rural Context. *Tourism Management*, 29(5), 1300–1309.
- United Nations and World Tourism Organization. (2025). *Guiding Principles for Sustainable Investment in Tourism*. New York/ Madrid.
- Wibowo, M. S., & Belia, L. A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 6(1).
- World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). Towards Sustainable Development.